

**ANALISA SOSIOLOGIS TERHADAP FENOMENA HISTORIS REVOLUSI  
SOSIAL PADA PERIODE KEMERDEKAAN INDONESIA**  
*Studi Kasus Keruntuhan Kerajaan Di Surakarta, Jawa Tengah*

*Rusli M.Said, S.S., M.Hum.*

*Junaib Umar, S.S., M.Si.*

**ABSTRACT**

*Political understanding is often identified as rigid maner. It can be seen in Surakarta's social revolution which overthrew feudal power. The use of strategic groups's concept suggest that reading conflict and revolution is not as easy as reading the surface. Woerjaningrat's analysis show that interest of elites interest is more prominent than conflict itself. It is why the understanding of socio-political phenomenon must include small social groups that are actively in it.*

Keywords: Strategic groups, Woerjaningrat

**PENDAHULUAN**

Pembahasan sejarah mengenai masa lalu tidak serta merta hanya terikat kepada bentuk naratif dari keilmuan sejarah. Banyak hal mengenai analisa sosiologis baik itu kelompok sosial politik maupun komunitas-komunitas lainnya seolah terlupakan. Padahal pembahasan mengenai kelompok-kelompok politik tentunya sangat penting terutama dalam situasi revolusi dimana terjadi instabilitas dan memungkinkannya setiap kelompok sosial mengekspresikan pemikiran dan kepentingan politiknya.

Salah satu contoh dari periode revolusi nasional, yang merembet kepada revolusi sosial melalui pencopotan status feodal kelompok status quo kekuasaan adalah kasus revolusi di Surakarta. Hal ini cukup menarik karena Surakarta yang berada di Jawa Tengah merupakan salah satu kerajaan yang paling berpengaruh di Pulau Jawa. Sebagai kerajaan tertua dari pewaris kerajaan Mataram Islam,. Surakarta dianggap menjadi pusat politik dan tradisionalitas orang Jawa pada masa kolonial.

Gerakan revolusi sosial di Surakarta sendiri menamakan dirina Gerakan Anti Swapraja dan telah banyak diulas oleh berbagai kajian sejarah. Akan tetapi sayangnya pembahasan Gerakan Anti Swapraja lebih banyak merupakan narasi historis yang tanpa ada upaya menunjukkan analisa historis dan sosiologis. Padahal peristiwa yang ada di

dalamnya sendiri dapat dianggap sebagai suatu laboratorium sosial guna mempelajari bagaimana kelompok-kelompok sosial politik berdasarkan kategorisasi tertentu tumbuh dan berkembang dalam suasana politik dan keamanan yang tidak menentu.

Penelitian mengenai keruntuhan swapraja (kerajaan) dan fenomena Gerakan Anti-Swapraja di Surakarta telah dikaji secara luas. Berbagai macam karya baik berupa buku, disertasi, tesis, skripsi hingga laporan penelitian telah banyak mengungkap berbagai macam peristiwa dalam fenomena ini. Kegagalan dalam menangkap realitas tersebut tak lepas dari kegagalan konsep yang diangkat. Penulisan-penulisan sejarah mengenai periode revolusi pada umumnya sangat dikungkung oleh sebuah konsep mengenai revolusi sosial. Revolusi seringkali dilihat sebagai sebuah perwujudan konflik kelas antara penguasa dan yang dikuasai. Selain itu pembentukan kelas-kelas berkuasa lebih ditinjau dari perbedaan kelas yang telah muncul sebelumnya dimana ia hadir dan ditentukan sebagai sebuah kelompok ekonomi ataupun profesi. Konsep-konsep mengenai konflik kelas itu dibawa pada pemahaman revolusi sosial di tataran lokal, dimana dalam penulisan ini mengambil kasus gerakan anti swapraja di Surakarta.

Artikel ini tidak bermaksud untuk mengungkapkan secara rinci peristiwa-peristiwa yang terjadi karena keterbatasan dalam masalah data dan penelitian. Akan tetapi makalah ini akan mencoba memberikan sudut pandang yang berbeda mengenai Surakarta pada masa revolusi nasional 1945-1949.<sup>1</sup> yaitu pemahaman mengenai gejolak sosial politik di Surakarta pada masa kemerdekaan yang ditinjau hanya dengan melihat sentimen revolusi sebagai satu-satunya unsur penentu dalam perilaku politik pada masa revolusi. Upaya untuk menggeneralisasikan struktur politik di Surakarta pada masa tersebut justru menyebabkan penyederhanaan fenomena politik yang terjadi. Kondisi ini menyebabkan pengabaian kemungkinan-kemungkinan dalam melihat politik sebagai kekuasaan yang sesungguhnya. Selain itu justru mengabaikan keunikan sejarah dimana setiap fenomena dapat digeneralisasikan dengan sederhana.<sup>2</sup> Persaingan politik diidentikkan dengan perebutan kekuasaan baik secara kelompok maupun individu dengan berbagai macam alasan dan tujuan.

Penulisan ini hanya akan menyajikan satu-satunya analisa pengelompokan sosial dari Kanjeng Raden Mas Haryo (KRMH) Woerjaningrat yang merupakan saksi

---

<sup>1</sup> Pheres Sunu Wijayengrono, *Sikap Politik Mangkunegaran Dalam Mempertahankan Swapraja 1945-1946*. Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret, 2005.

hidup dan tokoh yang aktif berperan di politik pada masa tersebut. Beberapa kritik tentunya akan disertakan sebagai bagian dari upaya melihatnya secara kritis. Bagian dari analisa selanjutnya akan disajikan pada artikel selanjutnya guna melengkapi puzzle dari analisa sosio historis yang terpisah.

## **KONSEP KELOMPOK STRATEGIS**

Kelompok strategis merupakan sebuah konsep yang ditawarkan oleh Hans Dieter-Evers & Tilman Schiel.<sup>3</sup> Konsep ini lahir dari sebuah keraguan yang muncul dari kedua ilmuwan sosial tersebut terhadap fenomena pembentukan struktur sosial yang berpengaruh terhadap peristiwa-peristiwa politik.

Kelebihan konsep kelompok strategis yang menurut penulis layak untuk disesuaikan dalam kasus gerakan anti swapraja di Surakarta adalah latar belakang penyusunan konsep bagi fenomena politik dan sosial di Asia Tenggara. Dengan demikian penggunaan konsep kelompok strategis tentu saja disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang berlaku di Asia Tenggara.

Kelompok strategis adalah sebuah kelompok yang terdiri dari individu-individu yang terikat oleh suatu kepentingan, yakni melindungi atau memperluas hasil yang diambil alih bersama. Hal-hal yang berkenaan dengan perluasan dan pengambilalihan ini tidak hanya berbentuk harta benda melainkan juga berupa kekuasaan, prestise, ilmu pengetahuan dan tujuan keagamaan.<sup>4</sup>

Kelompok strategis terbentuk secara khas, di daerah yang terbuka kesempatan untuk perolehan baru. Hal ini dapat terjadi dengan dimasukkannya ideologi baru, teknologi modern, model legitimasi teologis, dsb. Ia dapat dibedakan menurut cara pengambilalihannya yang berkaitan dengan ekonomi, secara individual, kolektif atau kooperatif. Sehingga mereka giat secara politis dan menggalakkan perbaikan dan perubahan sistem politik yang berlaku.

Ia secara khas mengikuti dua strategi mendasar:

---

<sup>2</sup> Alfred Cobban, *The Social Interpretation of The French Revolution*. London, New York, Ibadan: Cambridge University Press, 1965. p. 15. Alfred Corban bahkan mengatakan: "That all historical events are unique, and that generalization is the crime against history."

<sup>3</sup> Hans Dieter Evers & Tilman Schiel, *Kelompok-Kelompok Strategis; Studi Perbandingan tentang Negara, Birokrasi dan Pembentukan Kelas di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990).

<sup>4</sup> *Ibid.*,

1. *Hibridisasi*, suatu perluasan hasil pengambilalihan ke daerah-daerah baru dengan memanfaatkan sumber pendapatan yang baru.
2. Koalisi dengan cara kerjasama antar kelompok strategis dan juga dengan melakukan simbiose.

Kedua bentuk ini mengacu pada pembentukan kelas yang lebih kuat dimana ia merupakan faktor utama dalam penguasaan dan pengawasan sumber-sumber daya strategis. Hal ini dimaksudkan untuk memapankan stabilitas kelompok yang bersangkutan.

Dengan pembentukan kelas ini, simbiosis dan solidaritas, di antara kelompok strategis akan muncul keterancaman dengan upaya memperkuat diri karena pada akhirnya tindakan strategis yang dilakukan hanya akan memperkuat para pemimpin daripada para pengikut. Hal ini akan memunculkan pertentangan baru di balik kepentingan bersama yang sebelumnya diciptakan dan kadangkala membentuk kelompok-kelompok baru lainnya yang berkoalisi dan berkompetisi sesuai dengan situasi yang ada. Kemunculan-kemunculan kelompok strategis yang tak dapat diperkirakan inilah yang memperlihatkan bahwa struktur keanggotaan kelompok strategis bersifat elastis dan fleksibel.

Kerangka pikir kelompok strategis adalah bagian dari dinamika sosial perkembangan masyarakat. Inti dari analisis kelompok strategis meliputi terjadinya pertumbuhan dan hancurnya kelompok strategis sebagai proses jangka panjang. Begitu pula dengan bentuk yang berubah dari kerjasama dan konflik antar kelompok strategis hingga pembentukan kelas. Hal ini didasarkan oleh sebuah kenyataan bahwa hegemoni sebuah kelompok dapat menentukan sistem ekonomi dan politik dalam jangka waktu panjang dan setiap kelompok akan berebut untuk mencapainya.<sup>5</sup>

## **GENERALISASI STRUKTUR POLITIK WOERJANINGRAT**

Generalisasi politik sesungguhnya telah dilakukan oleh K.R.M.H Wuryaningrat yang merupakan salah satu tokoh utama dalam kehidupan politik di Surakarta sehingga harus disusun pemahaman mengenai generalisasi seperti yang pernah dilakukan olehnya. Bagian ini akan dibagi menjadi 2 tema yaitu uraian mengenai konsep struktur sosial politik di Surakarta pada masa kejatuhan Swapraja berdasarkan analisis K.R.M.H. Woerjaningrat dan kritik terhadap konsep tersebut.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

## Uraian Singkat

Tulisan yang berupaya mengkaji pengelompokan politik adalah karya K.R.M.H. Woerjaningrat, *Sekedar Uraian Tentang Swapraja Surakarta Setelah Proklamasi Kemerdekaan*. Dalam uraiannya kelompok politik pada masa tersebut terbagi menjadi tiga yang disebabkan orientasi politik pada pemerintahan lokal, yaitu: 1.) Kelompok pendukung Swapraja; 2.) Kelompok Moderat; 3) Kelompok Anti Swapraja.<sup>6</sup> Pembagian tersebut dijadikan acuan oleh untuk memecahkan kebuntuan politik di Surakarta dengan menyederhanakan pengelompokan politik yang terjadi pada kelompok politik di Surakarta.

Secara singkat akan diuraikan mengenai kelompok politik yang berada dalam kelompok-kelompok tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap para pelaku dalam fenomena gerakan anti swapraja di Surakarta. Meskipun dalam karyanya, Wuryaningrat tidak memberitahukan secara rinci mengenai identitas individu yang terlibat, penulisan ini berusaha mengembangkan sendiri keanggotaan dari tiap-tiap kelompok berdasarkan konsep pembagian yang dilakukan oleh Woerjaningrat. Di bawah akan dijelaskan kelemahan-kelemahan penyusunan struktur politik yang dibangun penulis berdasarkan konsep tersebut.

Kelompok pertama adalah Kelompok Pendukung Swapraja yang didasari oleh keinginan sebagian anggota masyarakat untuk mempertahankan sistem pemerintahan kerajaan tanpa adanya perubahan status politik kerajaan yang telah ada. Sebagian besar *aktor intelektual* anggota kelompok ini berasal dari kelompok bangsawan yang memegang kedudukan di kerajaan. Selain itu terdapat pula kelompok masyarakat yang secara historis telah dimobilisasi oleh pihak kerajaan.<sup>7</sup>

Kelompok sosial ini berusaha mengorganisir diri untuk mengkonsolidasikan kekuatannya dalam menghadapi tantangan yang muncul dalam penolakan swapraja. Kelompok-kelompok yang tergolong dalam gerakan ini selain pemegang kekuasaan di Kasunanan dan Mangkunegaran antara lain:

- 1) Gerakan Narpowandowo;
- 2) Pakempalan Kawulo Surokarto;

---

<sup>6</sup> K.R.M.H. Woerjaningrat, *Sekedar Uraian Tentang Swapraja Surakarta Setelah Proklamasi Kemerdekaan*. Surakarta: t.t, t.p. hal. 4.;

<sup>7</sup> Pheres Sunu Wijayengrono., *Op.Cit.*, hal. 27.

- 3) Pemuda Trah Surakarta;
- 4) Dewan Pamong Kerabat Surakarta;
- 5) Legiun Mangkunegaran;
- 6) Pakempalan Kerabat Mangkunegaran.<sup>8</sup>

Selain itu masih terdapat Krida Muda dan Kepanduan Mangkunegaran yang kemudian menyatu dengan Legiun Mangkunegaran pada masa republik. Terdapat juga Barisan Gyo Tai yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang dan bertugas menjaga istana Mangkunegaran dengan jumlah 100 orang.<sup>9</sup> Ketika kemerdekaan barisan ini melebur dengan Legiun dan akan memegang peranan penting dalam konfrontasi antara Mangkunegaran dan gerakan anti swapraja di Pura Mangkunegaran.<sup>10</sup>

Interpretasi pada umumnya memperlihatkan bahwa dukungan kelompok-kelompok sosial tersebut terhadap kerajaan selain disebabkan oleh hubungan historis mereka, juga terdapat hubungan ketergantungan ekonomi dengan kerajaan. Hal ini kemudian terbukti ketika hubungan terutama dalam bidang ekonomi antara pemimpin kerajaan dan para bupatinya terputus, para bupati-bupati tersebut akan menunjukkan loyalitasnya terhadap sumber ekonomi yang baru, yaitu pemerintah pusat.

Kelompok kedua adalah kelompok moderat yang menginginkan adanya perubahan dalam sistem kerajaan tanpa merubah keberadaan kerajaan di Surakarta.<sup>11</sup> Kelompok ini lebih didasarkan pada kesadaran tiap-tiap individu dalam memandang perubahan sosial di Surakarta dan keinginannya mempertahankan tradisi selain faktor oportuniste kekuasaan yang diperolehnya.

Pada umumnya anggota dari kelompok ini adalah individu-individu yang masih tergabung dalam sistem kekerabatan kerajaan. Akan tetapi tingginya latar belakang pendidikan yang diperoleh mereka menyebabkan perkembangan kepekaan dan kesadaran mereka dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial politik baik yang bersifat situasional maupun evolusioner. Di antara beberapa orang yang tergabung

---

<sup>8</sup> *Bendel Penjagaan Istana Mangkunegaran 1946.*

<sup>9</sup> Amin Singgih, 1944, *Oesaha dan Djasa Sri Mangkunagoro VII Terhadap Pendidikan dan Pengadjaran.* Surakarta: Reksa Pustaka, hal.2-3.

<sup>10</sup> *Bendel Penjagaan Istana Mangkunegaran 1946*; Amin Singgih.,*Op.Cit.* hal. 4.

<sup>11</sup> K.R.M.H. Woejaningrat.,*Op.Cit.* hal. 4.

dalam model gerakan ini yang berasal dari Kasunanan ialah K.P.H. Handyaningrat, R.T. Sutejo Brojonegoro, Mr. B.P.H. Sumodiningrat, G.P.H. Suryohamijoyo. Selain itu terdapat nama-nama G.P.H. Purbonagoro, G.P.H. Joyokusumo, Pangeran Mangkubumi, dll.<sup>12</sup> yang merupakan orang-orang dengan derajat kebangsawanan tinggi di keraton. Dari golongan Mangkunegaran terdapat beberapa nama, yaitu Sunarto Koesoemodirdjo, Mr. Amin Singgih, Mr. Atmodiningrat, Mr. Mohamad Dalyono.<sup>13</sup> Sedangkan dari golongan sipil terdapat nama I.J. Kasimo yang termasuk sebagai golongan moderat.

Banyak yang menduga sebab terciptanya golongan yang dipelopori oleh golongan bangsawan ini, selain masalah idealisme, hal lainnya ialah faktor ekonomi dan politik. Banyaknya kerabat Kasunanan yang menjadi pelopor dalam kelompok moderat daripada Mangkunegaran menunjukkan adanya suasana ketidakharmonisan dalam kerajaan Kasunanan. Hal ini disebabkan oleh tradisi pergantian tahta yang rumit dan tidak jelas dalam proses suksesi di Kasunanan. Sepeninggal Pakubuwono X pada 1939, di dalam Kasunanan telah muncul persaingan dan pertentangan politik. Terlebih dengan kematian cepat Pakubuwono XI pada tahun 1944 yang digantikan oleh Pakubuwono XII yang berada di bawah pengaruh Jepang menyebabkan semakin kompleksnya konflik-konflik politik dari tiap-tiap kelompok yang bertikai dalam memperebutkan tahta. Oleh sebab itu muncul rasa tidak puas dari beberapa kalangan kerabat Kasunanan untuk memanfaatkan revolusi agar mampu mendapatkan porsi kekuasaan selain upaya membalas dendam.<sup>14</sup>

Kelompok ketiga tergabung dalam kelompok Anti Swapraja. Keberadaan gerakan ini dilihat dari masa kolonial yang merupakan benih dari gerakan anti swapraja pada masa kemerdekaan. Mereka mampu mendapatkan dukungan dari kelompok masyarakat yang tersingkir secara ekonomi dari sistem politik dan ekonomi kolonial di Surakarta. Penentangan terhadap sistem diskriminatif ekonomi tersebut kemudian

---

<sup>12</sup> Panitia Pelaksana Pembangunan Monumen, 1985, *Perebutan Kekuasaan dan Pertempuran Kenpetai di Surakarta*. Surakarta: t.p. hal.14.

<sup>13</sup> Pheres Sunu Wijayengrono, *Op.Cit.*, hal. 28.

<sup>14</sup> George D. Larson, 1990, *Masa Menjelang Revolusi, Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta, 1912-194*, Terjemahan: Dr. A. B. Lopian. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hal. 288-303. Persaingan pada masa kemerdekaan terjadi di Kasunanan sedangkan di Mangkunegaran tidak terjadi peraiangan dalam suksesi Mangkunegara VIII. Pendapat tentang tidak adanya persaingan kekuasaan di Mangkunegaran dibantah K.P.H. Suryosurarlo yang mengatakan bahwa dilakukan penjegalan atas Gusti Nurul sebagai ahli waris yang sah. Wawancara tanggal 7 Maret 2005.

berkembang menjadi penentangan terhadap kekuasaan tradisional baik secara langsung maupun tidak langsung.

Situasi ini mulai mengemuka pada masa pendudukan Jepang dimana terdapat pembebasan tokoh politik yang berada di Digul, penggunaan intelektual pribumi dan mobilisasi pemuda. Para tokoh ex-Digulis yang berada di Surakarta ialah Ronomarsono, Kartopandoyo, Suyono, H. Dasuki, Wongso Sud, A. Rois.<sup>15</sup> Ketika proklamasi kemerdekaan terjadi, aktivis-aktivis politik tersebut bermunculan. Kehadiran para politisi ini meramaikan aktivitas politik di Surakarta yang telah meningkat dengan mobilisasi massa pada pendudukan Jepang sehingga ketika kemerdekaan mereka terkumpul dari berbagai macam latar belakang.

Tokoh-tokoh yang berasal bekas pegawai di jawatan Jepang di Surakarta seperti dr. Kartono Martosuwignyo (pegawai kesehatan), M. Suprpto (Peradilan Negeri), H. Asnawi Hadisiswoyo, K.H. Abdul Mufti, H. Surono Wiroharjono (Islam), Ismangun Wiyoto, Samsu Haryaudaya (Taman Siswa). Tokoh-tokoh lokal di Surakarta yang berasal dari militer seperti Ranuwijoyo, Suharto (PETA), Sujono Humardani, Iskandar Kusumodirjo (Seinendan), Mangkusudiyono, Sumokartiko (Keibodan). Sedangkan dari barisan pemuda terdapat beberapa tokoh yaitu Maladi (bekas ketua Indonesia Muda yang merupakan wakil kepala Jawatan Radio Surakarta dan ketua Angkatan Muda Indonesia), Sutarto, Wukiran, Notowardoyo (Menteng 31), Suyatno Yosodipuro, Sukarno, Harsono, Suryowirawan (Markas Delapan).<sup>16</sup>

Selain itu muncul pula barisan Pelopor yang telah terbentuk melalui usaha Jepang dalam rangka membentuk barisan militer pribumi, Suisintai. Meleburnya Suisintai menjadi Barisan Pelopor dan kemudian Barisan Banteng merubah kekuatan bersenjata yang pada mulanya merupakan barisan pengawal Sukarno menjadi kekuatan bersenjata yang paling berpengaruh di Surakarta pada masa kemerdekaan terutama dalam Gerakan Anti-Swapraja.<sup>17</sup>

Kelompok lainnya yang tergabung dalam kelompok ini adalah BKR Surakarta yang dibentuk pada tanggal 29 Agustus 1945 yang penetapannya disahkan pada tanggal 9 September 1945 dan pengambilan sumpah pimpinan BKR baru dapat dilaksanakan

---

<sup>15</sup> Panitia Pelaksana Pembangunan Monumen., *Op.Cit.* hal. 9.

<sup>16</sup> Panitia Pelaksana Pembangunan Monumen., *Op.Cit.* hal. 26.

<sup>17</sup> *Pidato Mangkunegaran dalam Pelatihan Suisintai* dalam *Kumpulan Pidato-pidato Mangkunegara dan Pejabat*. Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran.

pada 19 September 1945 di Stadion Sriwedari. BKR dipimpin oleh R.M. Mulyadi Joyomartono bekas Daidanco Dai-Ichi Didan Manahan.<sup>18</sup>

BKR mengumpulkan beberapa kelompok bersenjata yang terpisah seperti Markas Delapan yang didirikan dari kelompok Menteng 31 di Jakarta di bawah pimpinan Tukiran Notowardoyo yang melebur dengan BKR dan menjadi Polisi Tentara Keamanan Rakyat (PTKR) yang berfungsi sebagai polisi militer dari BKR. Dalam PTKR bergabung pula seluruh pasukan bekas Kenpei-Ho (Polisi Militer Pribumi masa pendudukan Jepang), bekas Yogeiki Butai dan Seinendan. Selain itu dibentuk pula Badan Pengawas Umum (BPU) yang merupakan bagian dari BKR yang di dalamnya terdapat K.P.H. Hamijoyo Santoso (adik Mangkunegara VIII dan bekas Cudanco Daichi Daidan Wonogiri, kemudian mengundurkan diri).<sup>19</sup>

Di luar BKR terdapat gerakan militan bersenjata seperti Angkatan Muda Tentara (AMT) yang sebagian besar berasal dari kesatuan Peta Wonogiri, Kaigun, Heiho dan Pelayaran dimana terdapat tokoh Slamet Riyadi, Rujito, Sutarto, dan Sentot Sugriwo.<sup>20</sup>

Beberapa organisasi militan lainnya yaitu Gerakan Rakyat Indonesia (GRI), Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI), Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Tentara Pelajar (TP) di bawah pimpinan Achmadi, Laskar Rakyat di bawah pimpinan Iskandar Kusumodirdjo, Barisan Semut Ireng, dan Laskar Buruh Indonesia (LBI).<sup>21</sup>

Orientasi perjuangan barisan tidak hanya berkembang dalam hubungan komunitas badan perjuangan, akan tetapi pula memiliki hubungan dengan partai-partai yang ada. Maklumat Wapres No. X tahun 1945 yang mengatur tentang pendirian partai-partai politik di Indonesia menyebabkan munculnya organisasi bersenjata yang didasarkan kepentingan partai-partai yang terkait.<sup>22</sup> Hal ini seperti diperlihatkan dengan

---

<sup>18</sup> *Surat Pemberitahuan Pendirian BKR Kepada Mangkunegaran Kooti, 1945*. Arsip Reksa Putaka Mangkunegaran.

<sup>19</sup> B.P.H. Hamijoyo Santoso tidak termasuk Gerakan Anti Swapraja dimana pada masa konflik dia menduduki jabatan wedana Satria. *Bendel Rupa-rupa* 1946, 1951.

<sup>20</sup> Panitia Pelaksanan Pembangunan Monumen., *Op.Cit.* hal. 26-27.

<sup>21</sup> Pembentukan laskar rakyat pada mulanya ditujukan untuk mengkoordinasi badan-badan perjuangan yang ada dengan dikeluarkannya maklumat tertanggal 13 November 1945. *Kedaulatan Rakyat*. 13 November 1945. Dokumen Monumen Pers.

<sup>22</sup> Pramoedya Ananta Toer, 1999. *Kronik Revolusi I*. Jakarta: Gramedia, hal. 86.

kehadiran Pesindo Surakarta di bawah Partai Sosialis (PS), Hisbullah di bawah Masyumi, dll.

Selain itu muncul beberapa organisasi perjuangan lokal di tiap-tiap daerah di Surakarta antara lain: Laskar Rakyat Surakarta di desa Plupuh (Sragen), Pemuda Laskar Rakyat, Pemuda Penjaga Desa, Pelopor Laskar Rakyat dan Markas Pertahanan Desa dan Laskar Alap-alap yang berada di bekas daerah Mangkunegaran terutama Karanganyar.<sup>23</sup> Organisasi pertahanan lokal yang dibentuk di pedesaan ini pada umumnya terbentuk pada tahun 1946. Mereka terdiri dari pemuda desa, pemimpin politik dan tokoh agama. Nama organisasi ini berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

### **Kritik Terhadap Strukturalisasi Politik**

Pembagian kelompok-kelompok politik yang dilakukan oleh K.R.M.H. Woerjaningrat memiliki beberapa kelemahan. Pada bagian pertama akan ditunjukkan kelemahan dengan menunjukkan kedudukan/peran K.R.M.H. Woerjaningrat dalam membentuk analisisnya. Dengan demikian ada baiknya kita meninjau latar belakang K.R.M.H. Woerjaningrat terutama yang berkaitan dengan peran politiknya.<sup>24</sup>

Woerjaningrat merupakan putra resmi dari Patih Sosrodiningrat IV yang memiliki kecerdasan dan ambisi yang kuat. Ia disingkirkan oleh pemerintah kolonial dari jabatan patih dan dibenci akibat sentimen anti Belandanya. Pada masa kepemimpinan Pakubuwono X, Woerjaningrat merupakan salah seorang tokoh anti Belanda di lingkungan keraton, dapat dipastikan bahwa Woerjaningrat merupakan pendukung gagasan Indonesia merdeka. Ia pernah memegang jabatan sekertaris umum kepatihan sekaligus sebagai Presiden Budi Utomo. Kedudukan Woerjaningrat di dalam keraton sempat tersudut ketika kelompok pendukung Belanda di bawah Hangabehi (Paku Buwono XI) memenangkan konflik suksesi pada tahun 1939.<sup>25</sup> Tersingkirnya Woerjaningrat dari arena politik Keraton terobati dengan kedatangan tentara Jepang.

---

<sup>23</sup> Suyatno Kartodirdjo., *Op.Cit.*, hal.102.

<sup>24</sup> Pengabaian peran Woerjaningrat dalam penulisan sejarah juga dikritisi oleh Larson mengingat perannya yang sangat besar baik pada masa kolonial hingga kemerdekaan. Larson., *Op.Cit.* hal. 113.

<sup>25</sup> Woerjaningrat adalah pendukung R.M.H. Kartodipoero atau B.P.H. Soemodiningrat yang terlibat Parindra dan Pakubuwono X yang cenderung anti Belanda. Larson., *Op.Cit.*, hal.291

Mengingat posisi dan kedudukan politiknya pada masa kolonial, tentara Jepang memberikan kepercayaan kepadanya untuk menempati jabatan-jabatan penting dalam pemerintah pendudukan. Woerjaningrat diberi kedudukan sebagai pemimpin Gerakan 3 A di Surakarta. Woerjaningrat juga dipercaya sebagai anggota *Chuo Sangi-in* pada tahun 1943 (Dewan Pertimbangan Pusat) yang berkedudukan di Jakarta. Kedudukan *Chuo Sangi-in* pada masa pendudukan Jepang sangat berarti karena dewan tersebut merupakan lembaga tertinggi bagi masyarakat pribumi.

Meskipun Woerjaningrat kembali ditunjuk sebagai anggota BPUPKI dan PPKI,<sup>26</sup> hal ini tidak menandakan bahwa sejak tahun 1943 kehidupan politiknya telah terpisah dengan Surakarta. Ketika kemerdekaan tiba, ia memilih kembali ke Surakarta untuk bekerjasama dengan bekas anak didiknya yaitu Soemodiningrat<sup>27</sup> untuk membangun lembaga pendukung kemerdekaan. Woerjaningrat kemudian menjadi barisan oposisi Paku Buwono XII<sup>28</sup> dengan membentuk gerakan bawah tanah. Akan tetapi terjadi perubahan dalam posisi politik Woerjaningrat ketika pada bulan November 1945, Patih Sosrodiningrat V diculik. Woerjaningrat ditunjuk sebagai patih yang baru.<sup>29</sup>

Perubahan orientasi ini menjelaskan mengapa dalam tulisannya terdapat pemihakan yang sangat kuat terhadap pihak swapraja. Upaya generalisasi yang diciptakan oleh Woerjaningrat disebabkan kebutuhan praktisnya dalam memilah-milah unsur-unsur politik di Surakarta. Di sini kita akan menemukan karya Woerjaningrat dari sumber otoritasnya. Dapat dipastikan, bahwa sebagai orang yang terlibat dalam peristiwa ini (baik ketika menjadi oposisi maupun patih) Woerjaningrat mengetahui dengan pasti unit-unit struktur politik yang dibangunnya. Akan tetapi, Woerjaningrat sendiri tidak menjelaskan bagaimana pembentukan struktur dan unit-unit strukturnya sendiri. Dalam hal ini kita dapat mengatakan bahwa gagasan yang dibangun oleh Woerjaningrat mungkin sesuai atau koresponden dengan pengalaman hidupnya, namun justru menggiring para pembaca/pengguna yang telah terbiasa tergeneralisasi dalam

---

<sup>26</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, hal. 16.

<sup>27</sup> Anak kesayangan Pakukubuwono X yang disingkirkan oleh Belanda dan Hangabehi dari tahta Kasunanan.

<sup>28</sup> Putra Paku Buwono XI, PB XI sendiri meninggal pada tahun 1945.

memahami kejatuhan swapraja di Surakarta dengan hanya memandang dari semangat anti feodal dan revolusi untuk membuat sebuah kekeliruan.

Kelemahan kedua adalah ketidakmampuan konsep berpikir seperti yang disebutkan di atas dalam menanggapi kompleksitas keterlibatan, peran dan perilaku politik yang berkaitan dengan gerakan anti swapraja. Sebagai contoh adalah fenomena Woerjaningrat dimana sulit untuk mengidentikkan dirinya dengan suatu kelompok tertentu. Kelompok lainnya ada TKR yang terpecah menjadi dua antara Divisi Senopati di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang berbeda dalam menanggapi kedua swapraja di atas. Kemudian kaitan antara PM Sutan Syahrir yang berusaha melindungi kerajaan dan *onderbouwnya*, Pesindo yang anti swapraja karena berada dalam pengaruh Menteri Pertahanan Amir Syariffudin. Selain itu fenomena dukungan Presiden Soekarno terhadap kerajaan dan *onderbouwnya* Barisan Banteng yang menjadi barisan terdepan dalam anti swapraja. Kemudian fenomena konflik tahta di Mangkunegaran yang menyebabkan ia terpecah menjadi dua (bahkan satu di antaranya merupakan salah satu pendukung anti swapraja). Hal itu menunjukkan bahwa penyederhanaan dan penggolongan para pelaku akan menciptakan kekeliruan pemahaman terhadap peristiwa itu sendiri. Persaingan politik adalah persaingan merebut kekuasaan dan menguasai sumber daya ekonomi yang ada.

Gerakan Anti Swapraja di Surakarta tidak dapat dilihat dalam konteks penguasa dan rakyat serta runtuhnya kesetiaan publik terhadap kekuasaan raja. Bukti yang ada justru menunjukkan bahwa pada umumnya rakyat kecil masih tetap menganggap kekuasaan swapraja sebagai tuan atau raja mereka. Hal ini terlihat dari pengumpulan penduduk pada saat Tahun Baru Jawa pada bulan April 1946 yang menganggap pihak swapraja sebagai kekuatan mistis pelindung mereka.<sup>30</sup> Hal ini terjadi karena sentimen dan mobilisasi anti swapraja hanya terpusat pada daerah perkotaan terutama di Surakarta dan tak pernah mampu memasuki dunia pedesaan di Surakarta itu sendiri.<sup>31</sup>

Perubahan sosial ini dikarenakan akumulasi kekecewaan masyarakat perkotaan lebih besar daripada masyarakat pedesaan. Kota Surakarta tetap menjadi sumber

---

<sup>29</sup> Cahya Putri Musaparsih, *Strategi KNIDS Dalam Merebut Pemerintahan Swapraja 1945-1946*. Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2005.

<sup>30</sup> Fenomena yang terjadi justru tradisi keliling tembok keraton sebanyak 7 kali, baik di Kasunanan dan Mangkunegaran, yang dianggap sebagai pengganti naik haji ke Mekah dan simbolisasi Raja sebagai pusat kosmis diikuti oleh ribuan rakyatnya. Selain itu kirab pusaka yang hingga kini masih berlangsung, pada masa tersebut sangat dinanti-nantikan oleh seluruh warga yang menghormati kesaktian para raja.

<sup>31</sup> Pheres Sunu Wijayengrono., *Op.Cit*, hal. 117.

eksploitasi baik secara ekonomi maupun sumber tenaga kerja pada masa pendudukan Jepang meskipun desa masih tetap menjadi sumber pengumpulan bahan pangan. Belum lagi penumpukkan berbagai macam kepentingan pendudukan baik secara ekonomi maupun militer, sehingga masyarakat melihat kota Surakarta sebagai pusat penindasan.

Sebuah fenomena yang cukup menarik adalah kemunculan gerakan sosial di Surakarta. Pada mulanya, gerakan-gerakan yang mendukung kemerdekaan maupun anti swapraja muncul pertama kali dari kaum intelektual yang termarginalkan secara politis kemudian disusul oleh barisan-barisan militan yang berafiliasi dengan salah satu kekuatan politik dari kalangan intelektual. Hubungan kedua kelompok ini bersifat temporer dan tidak kekal. Ketika terjadi konflik di dalam persekutuan ini, salah satu pihak dengan bebas mencari sekutu baru. Hal ini tidak hanya terjadi dalam konteks kelompok tetapi juga secara individual. Keanggotaannya bersifat terbuka, fleksibel dan elastis sesuai dengan situasi politik yang berkembang, namun semua pihak memiliki berbagai macam tujuan.

## **PENUTUP**

Analisa sosial terhadap fenomone sosiologis historis merupakan hal yang sering terabaikan. Padahal banyak fenomena historis justru memberi data yang sangat kaya guna bangunan teoritik atas berbagai fenomena sosial politik di Indonesia. Kondisi ini tentunya sangat menguntungkan akademisi guna melihat sejauh mana suatu struktur sosial dapat berkembang dan kemudian tumbuh menjadi kekuatan revolusi sosial. Konflik kelas yang sering didengungkan dalam setiap periode revolusi sosial sendiri rupanya tidak sepenuhnya berlaku, atau dapat dikatakan hanya merupakan propaganda dari peristiwa itu sendiri. Kepentingan politik per kelompok sosial justru menjadi lebih dominan guna mencapai kekuasaan.

Analisa KRMH Woerjaningrat mengenai strukturalisasi politik di atas tentunya dapat menjadi cermin bagaimana konflik politik lebih didukung oleh kelompok-kelompok politik dalam ruang lingkup terbatas atau personal. Tidak ada relasi antara konflik kelas dengan kepentingan politik secara umum. Ideologi pertentangan kelas hanya menjadi ideologi propaganda dalam aktivitas revolusi dan bukan inti dari kompetisi politik itu sendiri. Kritik di atas lebih bersifat situasional terutama dalam pengelompokan nama dan kelompok sosial politik di dalamnya. Uraian lebih lanjut akan disajikan dalam penulisan artikel berikutnya yang lebih menekankan detail data dan bukan esensi dari aplikasi konsep kelas strategis itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Arsip

*Bundel Masalah PETA*. Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran.

*Bendel Penjagaan Istana Mangkunegaran 1946*. Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran.

*Bendel Rupa-rupa 1946, 1951*. Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran.

*Dagregister Mangkunegara VII*. Arsip Perpustakaan Mangkunegaran.

*Laporan Barang yang Hilang dan Rusak, 1945,1946,1947,1948*. Arsip Radya Pustaka Kasunanan Surakarta.

*Osamu Seirei No. 2 tahun 1944*. Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran.

*Pidato Mangkunegaran dalam Pelatihan Suisintai dalam Kumpulan Pidato-pidato Mangkunegara dan Pejabat*. Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran.

*Surat Pemberitahuan Pendirian BKR Kepada Mangkunegaran Kooti, 1945*. Arsip Reksa Putaka Mangkunegaran.

### Sumber Pustaka

Alfred Cobban, 1965, *The Social Interpretation of The French Revolution*, London, New York, Ibadan: Cambridge University Press.

Amin Singgih, 1944, *Oesaha dan Djasa Sri Mangkunagoro VII Terhadap Pendidikan dan Pengadjaran*. Surakarta: Reksa Pustaka.

- Cahya Putri Musaparsih, *Strategi KNIDS Dalam Merebut Pemerintahan Swapraja 1945-1946*. Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2005.
- Djawatan Penerangan Kota Besar Surakarta, 1953, *Kenang-kenangan Kota Besar Surakarta, 1945-1953*, Surakarta: t.p
- George D. Larson, 1990, *Masa Menjelang Revolusi, Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta, 1912-1942*, Terjemahan: Dr. A. B. Lopian. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hans-Dieter Evers & Tilman Schiel, 1990, *Kelompok-Kelompok Strategis; Studi Perbandingan tentang Negara, Birokrasi dan Pembentukan Kelas di Dunia Ketiga*, Diterjemahkan oleh: Aan Effendi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Karkono Kamajaya, *Revolusi di Surakarta*. Temu Ilmiah Balai Kajian Jarahnitra Depdikbud, Yogyakarta, Sabtu, 28 Agustus 1993.
- Panitia Pelaksana Pembangunan Monumen, 1985, *Perebutan Kekuasaan dan Pertempuran Kenpetai di Surakarta*. Surakarta: t.p.
- Pheres Sunu Wijayengrono, *Sikap Politik Mangkunegaran Dalam Mempertahankan Swapraja 1945-1946*. Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret, 2005.
- Pramoedya Ananta Toer, 1999. *Kronik Revolusi I*. Jakarta: Gramedia.
- Rustono, *Karanganyar di Masa Kemerdekaan 1945-1950*. Skripsi Universitas Sebelas Maret 1996.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

K.R.M.H., Woerjaningrat, *Sekedar Uraian Tentang Swapraja Surakarta Setelah Proklamasi Kemerdekaan*. Surakarta: t.t, t.p.